



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG INDUSTRI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELIA SATRIANI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA
3. NHK : 550690

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	15.740.000
1. MOTOR, HONDA NC11B3C A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
2. MOTOR, HONDA NF125TR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
3. MOTOR, YAMAHA IS7 Tahun 2007, LAINNYA Rp. 2.740.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	15.740.000

III. HUTANG Rp. 188.630.455

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -172.890.455

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Maret 2020**.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASKUR
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 430101

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/140 m² di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 252.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS FORTUNER Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 142.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI GRAND AVEGA 1.4 MTNE Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOTOR, HONDA CBR 150 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.550.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 564.550.000

III. HUTANG Rp. 95.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 469.550.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SURYA RIDWAN
2. Jabatan : PENGOLAH DATA SARANA, PRASARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK
3. NHK : 423962

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m²/45 m² di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ----

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 210.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 210.000.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : VINA VERONICA
2. Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN
3. NHK : 403938

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/20 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , WARISAN Rp. 120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/50 m2 di PULANG PISAU, WARISAN Rp. 40.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/50 m2 di PULANG PISAU, WARISAN Rp. 40.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/30 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , LAINNYA Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 102.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2012, WARISAN Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 27.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 679.000.000**III. HUTANG** Rp. 64.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 615.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM SOEDARMANTO
2. Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 626209

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	210.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/115 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	25.905.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.100.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SCOOTER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.805.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.749.853
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	266.654.853
III. HUTANG	Rp.	223.454.704
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	43.200.149

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKA SAPTIKA SARI
2. Jabatan : BENDAHARAWAN PENGELUARAN
3. NHK : 403947

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 12.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 5.500.000

1. MOTOR, SUZUKI UW125SC Tahun 2008, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.983.960

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 38.983.960

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 38.983.960

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.